



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Desa dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- (6) Apabila kepala Desa tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Desa dapat menyusun dan menetapkan Peraturan kepala Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - (7) Dalam hal penetapan APBDesa menggunakan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kepada Desa bersangkutan hanya disalurkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. Ketentuan Pasal 21 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Kepala Desa yang tidak menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPD, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan penghasilan tetap selama 2 (dua bulan), terhitung bulan November sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Kepala Desa dan BPD yang tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepada kepala Desa dan BPD dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. tidak dibayarkan penghasilan tetap selama 2 (dua bulan), untuk Kepala Desa terhitung bulan November sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tidak dibayarkan tunjangan selama 2 (dua bulan), untuk BPD terhitung bulan November sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21.A

- (1) Apabila kepala Desa tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kepala Desa dapat menyusun dan menetapkan Peraturan kepala Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal penetapan APBDesa menggunakan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Desa bersangkutan hanya disalurkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode rekening program kegiatan pada APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Buku Bank Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.

- (11) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan/atau semester akhir tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.
 - (12) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan kepada Bupati;
 - b. kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. kepala Desa telah menyampaikan LPPD tahun anggaran sebelumnya dan/atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa semester I; dan
 - b. realisasi keuangan yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang telah ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa semester I;
 - b. realisasi keuangan Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total Dana Desa yang telah di transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahun anggaran berjalan belum berakhir.

6. Ketentuan Pasal 47 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah SiLPA Dana Desa direalisasikan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat minggu kedua bulan April pada tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat minggu kedua bulan Juli pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat minggu kedua bulan Oktober pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk belanja:
- a. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. bidang tak terduga.
- (4) Khusus belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan, dapat disalurkan setiap bulan sebelum tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan.
8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. APBDesa tahun anggaran berkenaan telah diundangkan;
 - b. kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. kepala Desa telah menyampaikan LPPD tahun anggaran sebelumnya dan/atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi ADD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa semester I; dan
 - b. realisasi keuangan yang bersumber dari ADD paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD yang telah ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa semester I;

- b. realisasi keuangan APBDesa, paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer pada APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
- c. tahun anggaran berkenaan belum berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

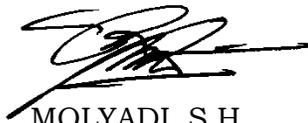
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA



KEPALA DESA.....
KABUPATEN KAYONG UTARA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor.... Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Nomor...);
7. Peraturan DesaNomor.... Tahun.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun 20...-20.....(Lembaran DesaTahun..... Nomor.....);
8. Peraturan Desa Nomor.... Tahun..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun 20.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

| | |
|------------------------------|------------------|
| e. Bidang Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah Belanja | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Telah di Evaluasi.....) Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

(Nama tanpa pangkat dan gelar)

LEMBARAN DESA TAHUN..... NOMOR.....

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------|---|---|---|--|---------------|------------|
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | | | <i>Pendapatan Transfer</i> | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| | | | | | | |
| 1 | 3 | | | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | |
| | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | |
| 2 | 1 | | | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dan Atribut | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | |
| | | | | - Air, Listrik, dan Telepon | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | - Honor | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | |
| | | | | | - Komputer | | |
| | | | | | - Meja dan Kursi | | |
| | | | | | - Mesin TIK | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Operasional BPD | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | | - ATK | | |
| | | | | | - Penggandaan | | |
| | | | | | - Konsumsi Rapat | | |
| | | | | | - dst | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Operasional RT/ RW | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | | - ATK | | |
| | | | | | - Penggandaan | | |
| | | | | | - Konsumsi Rapat | | |
| | | | | | - dst | | |
| 2 | 2 | | | | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Perbaikan Saluran Irigasi | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan jasa | | |
| | | | | | - Upah Kerja | | |
| | | | | | - Honor | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | |
| | | | | | - Semen | | |
| | | | | | - Material | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 2 | 2 | | | Pengaspalan jalan desa | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa : | | |
| | | | | | - Upah Kerja | | |
| | | | | | - Honor | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | | Belanja Modal: | | |
| | | | | | - Aspal | | |
| | | | | | - Pasir | | |
| | | | | | - dst | | |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan..... | | |
| 2 | 3 | | | | <i>Bidang Pembinaan Masyarakat</i> | | |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa: | | |
| | | | | | - Honor Pelatih | | |
| | | | | | - Konsumsi | | |
| | | | | | - Bahan Pelatihan | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 3 | 2 | | | Kegiatan..... | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> | | |
| 2 | 4 | 1 | | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa: | | |
| | | | | | - Honor pelatih | | |
| | | | | | - Konsumsi | | |
| | | | | | - Bahan pelatihan | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 4 | 2 | | | Kegiatan..... | | |
| 2 | 5 | | | | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa: | | |
| | | | | | - Honor tim | | |
| | | | | | - Konsumsi | | |
| | | | | | - Obat-obatan | | |
| | | | | | - dst..... | | |
| 2 | 5 | 2 | | | Kegiatan..... | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | | | <i>SURPLUS / DEFISIT</i> | | |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN | | |
| 3 | 1 | | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | |
| 3 | 2 | | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Desa | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | |

KEPALA DESA

TTD

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa PERUBAHAN



KEPALA DESA.....
KABUPATEN KAYONG UTARA

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi rencana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor.... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor....);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Nomor....);
10. Peraturan DesaNomor.... Tahun.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun 20...-20.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);
11. Peraturan DesaNomor.... Tahun.... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun 20.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);

12. Peraturan DesaNomor.... Tahun.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 20.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|------------------|
| 4. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 5. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... ===== |
| 6. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Telah di Evaluasi Bupati/walikota

a.n. Camat

ttid

(.....)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

(Nama tanpa pangkat dan gelar)

LEMBARAN DESA TAHUN..... NOMOR.....

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PERUBAHANTAHUN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
 TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH /BERKURAN G |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1 1 | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | |
| 1 1 1 | Hasil Usaha | | | |
| 1 1 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | |
| 1 1 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | |
| 1 2 | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | |
| 1 2 1 | Dana Desa | | | |
| 1 2 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | | |
| 1 2 3 | Alokasi Dana Desa | | | |
| 1 2 4 | Bantuan Keuangan | | | |
| 1 2 4 1 | Bantuan Provinsi | | | |
| 1 2 4 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | |
| 1 3 | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | | |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | |
| 1 3 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2 1 | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | | |
| 2 1 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | |
| 2 1 1 1 | Belanja Pegawai: | | | |
| | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | |
| | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | |
| | - Tunjangan BPD | | | |
| 2 1 2 | Operasional Perkantoran | | | |
| 2 1 2 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| | - Alat Tulis Kantor | | | |
| | - Benda POS | | | |
| | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | |
| | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | |
| | - Perjalanan Dinas | | | |
| | - Pemeliharaan | | | |
| | - Air, Listrik, dan Telepon | | | |
| | - Honor | | | |
| | - dst..... | | | |
| 2 1 2 3 | Belanja Modal | | | |
| | - Komputer | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | - Meja dan Kursi | | | | |
| | | | | | - Mesin TIK | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | | - ATK | | | | |
| | | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | | - dst | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | | - ATK | | | | |
| | | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | | | | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan jasa | | | | |
| | | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | | - Honor | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| | | | | | - Semen | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | Pengaspalan jalan desa | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa : | | | | |
| | | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | | - Honor | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | | Belanja Modal: | | | | |
| | | | | | - Aspal | | | | |
| | | | | | - Pasir | | | | |
| | | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 3 | | | | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | | - Honor Pelatih | | | | |
| | | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | | - Bahan Pelatihan | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 4 | | | | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | | - Honor pelatih | | | | |
| | | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | | - Bahan pelatihan | | | | |
| | | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 5 | | | | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | |
| | | | | - Honor tim | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | |
| | | | | - Obat-obatan | | | |
| | | | | - dst..... | | | |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan..... | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | <i>SURPLUS / DEFISIT</i> | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | |
| 3 | 1 | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA | | | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | |
| | | | | JUMLAH (Rp) | | | |
| | | | | | | | |

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

TTD

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

KODE REKENING
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

| KODE REKENING | | | | URAIAN |
|---------------|---|----|---|---|
| 1 | | | | 2 |
| 1 | | | | PENDAPATAN |
| 1 | 1 | | | <i>Pendapatan Asli Desa</i> |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
| | | | | |
| 1 | 2 | | | <i>Pendapatan Transfer</i> |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten |
| | | | | |
| 1 | 3 | | | <i>Pendapatan Lain lain</i> |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | | BELANJA |
| 2 | 1 | | | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT |
| | | | | |
| | | | | <i>Penataan Desa</i> |
| 2 | 1 | 5 | | Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
| 2 | 1 | 6 | | Pendataan Desa |
| 2 | 1 | 7 | | Penyusunan Tata Ruang Desa |
| | | | | |
| | | | | <i>Perencanaan Pembangunan Desa</i> |
| 2 | 1 | 8 | | Musyawarah Desa |
| 2 | 1 | 9 | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 1 | 10 | | Penyusunan RPJMDesa |
| 2 | 1 | 11 | | Penyusunan RKPDesa |
| 2 | 1 | 12 | | Pembentukan TPK Pengadaan Barang dan Jasa Desa |
| 2 | 1 | 13 | | Penyusunan Rancangan APBDesa |
| 2 | 1 | 14 | | Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa |
| 2 | 1 | 15 | | Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa |
| 2 | 1 | 16 | | Pengisian Keanggotaan BPD |
| 2 | 1 | 17 | | Musyawarah Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu |
| 2 | 1 | 18 | | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|----|--|--|
| | | | | <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i> |
| 2 | 1 | 19 | | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa |
| 2 | 1 | 20 | | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa |
| 2 | 1 | 21 | | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| 2 | 1 | 22 | | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) |
| 2 | 1 | 23 | | Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) |
| 2 | 1 | 24 | | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| | | | | |
| | | | | <i>Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa</i> |
| 2 | 1 | 25 | | Penyusunan Peraturan Desa |
| 2 | 1 | 26 | | Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa |
| 2 | 1 | 27 | | Penyusunan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa |
| 2 | 1 | 28 | | Dst..... |
| | | | | |
| 2 | 2 | | | <i>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i> |
| | | | | <i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</i> |
| 2 | 2 | 1 | | Pembangunan / Pemeliharaan Tambatan Perahu |
| 2 | 2 | 2 | | Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Pemukiman |
| 2 | 2 | 3 | | Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian |
| 2 | 2 | 4 | | Pembangunan / Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro |
| 2 | 2 | 5 | | Pembangunan / Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa |
| 2 | 2 | 6 | | Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan Desa & Dusun |
| 2 | 2 | 7 | | Pembangunan / Pemeliharaan Kantor Desa |
| 2 | 2 | 8 | | Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa |
| 2 | 2 | 9 | | Pembangunan / Pemeliharaan Pintu Air & Kesdam |
| 2 | 2 | 10 | | Pembangunan / Pemeliharaan Tanggul Air |
| 2 | 2 | 11 | | Pembangunan / Pemeliharaan Embung Desa |
| | | | | |
| | | | | <i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa</i> |
| 2 | 2 | 12 | | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Skala Desa |
| 2 | 2 | 13 | | Pembangunan/Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan |
| 2 | 2 | 14 | | Pembangunan Posyandu/ Poskesdes/ Pustu |
| 2 | 2 | 15 | | Pengadaan dan Pemeliharaan Ambulance Desa |
| 2 | 2 | 16 | | Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya |
| | | | | |
| | | | | <i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa</i> |
| 2 | 2 | 17 | | Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat |
| 2 | 2 | 18 | | Pembangunan/Pemeliharaan Perpustakaan Desa |
| 2 | 2 | 19 | | Pembangunan / Pemeliharaan TPA |
| 2 | 2 | 20 | | Pembangunan / Pemeliharaan PAUD |
| 2 | 2 | 21 | | Pembangunan / Pemeliharaan PKBM |
| 2 | 2 | 22 | | Pembangunan / Pemeliharaan Sanggar Seni |
| 2 | 2 | 23 | | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Lainnya |
| | | | | |
| | | | | <i>Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi</i> |
| 2 | 2 | 24 | | Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa |
| 2 | 2 | 25 | | Pembentukan dan Pengembangan BUMDes |
| 2 | 2 | 26 | | Penguatan Permodalan BUMDes |
| 2 | 2 | 27 | | Pembibitan Tanaman Pangan |
| 2 | 2 | 28 | | Pembangunan Penggilingan Padi Milik Desa |

| | | | | |
|---|---|----|--|--|
| 2 | 2 | 29 | | Pengelolaan Usaha Hutan Desa |
| 2 | 2 | 30 | | Pembangunan / Pemeliharaan Lumbung Desa |
| 2 | 2 | 31 | | Pembukaan Lahan Pertanian |
| 2 | 2 | 32 | | Pembuatan / Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan |
| 2 | 2 | 33 | | Pembuatan / Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan |
| 2 | 2 | 34 | | Pembangunan / Pemeliharaan Gudang Pendingin (<i>cool storage</i>) |
| 2 | 2 | 35 | | Pembangunan/ Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan |
| 2 | 2 | 36 | | Pembangunan / Pemeliharaan Tambak Garam |
| 2 | 2 | 37 | | Pembangunan / Pemeliharaan Kandang Ternak |
| 2 | 2 | 38 | | Pembangunan / Pemeliharaan Instalasi Biogas |
| 2 | 2 | 39 | | Pengadaan Mesin Pakan Ternak |
| 2 | 2 | 40 | | Pembangunan Fasilitas Wisata Desa |
| 2 | 2 | 41 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Lainnya |
| 2 | 2 | 42 | | Pemeliharaan Kandang Ternak |
| 2 | 2 | 43 | | Pemeliharaan Instalasi Biogas |
| 2 | 2 | 44 | | Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak |
| 2 | 2 | 45 | | Pemeliharaan Fasilitas Wisata Desa |
| 2 | 2 | 46 | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Lainnya |
| | | | | |
| | | | | <i>Pelestarian Lingkungan Hidup</i> |
| 2 | 2 | 47 | | Penghijauan Desa |
| 2 | 2 | 48 | | Pembuatan Terasering |
| 2 | 2 | 49 | | Pemeliharaan Hutan Bakau |
| 2 | 2 | 50 | | Perlindungan Mata Air |
| 2 | 2 | 51 | | Pembersihan Daerah Aliran Sungai |
| 2 | 2 | 52 | | Perlindungan Terumbu Karang |
| 2 | 2 | 53 | | Perlindungan Situs Budaya Desa |
| | | | | |
| | | | | <i>Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Desa Lainnya</i> |
| 2 | 2 | 54 | | Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Pertemuan Desa |
| 2 | 2 | 55 | | Pembangunan /Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum |
| 2 | 2 | 56 | | Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan |
| 2 | 2 | 57 | | Pembangunan /Pemeliharaan Rumah Ibadah |
| 2 | 2 | 58 | | Pembangunan /Pemeliharaan Lapangan Desa |
| 2 | 2 | 59 | | Pembangunan /Pemeliharaan Taman Desa |
| 2 | 2 | 60 | | Pembangunan /Pemeliharaan Rumah Adat |
| 2 | 2 | 61 | | Pembangunan /Pemeliharaan Balai Pelatihan |
| 2 | 2 | 62 | | Pembangunan /Pemeliharaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan |
| | | | | |
| | | | | <i>Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Desa</i> |
| 2 | 2 | 63 | | Pengadaan /Pemeliharaan Tanah Kas Desa |
| 2 | 2 | 64 | | Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 65 | | Pengadaan Kendaraan Operasional Desa |
| 2 | 2 | 66 | | Dst |
| | | | | |
| 2 | 3 | | | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> |
| 2 | 3 | 1 | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 2 | | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 3 | | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama |
| 2 | 3 | 4 | | Pengadaan Sarana dan Prasaranan Olahraga |
| 2 | 3 | 5 | | Pembinaan Lembaga Adat |
| 2 | 3 | 6 | | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat |
| 2 | 3 | 7 | | Pembinaan Sosial Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 8 | | Pembinaan Sosial Keagamaan |
| 2 | 3 | 9 | | Pembinaan Organisasi Kepemudaan |
| 2 | 3 | 10 | | Bantuan Kegiatan PHBI |
| 2 | 3 | 11 | | Bantuan Kegiatan PHBN |
| 2 | 3 | 12 | | Pembinaan Kegiatan Lomba Desa |
| 2 | 3 | 13 | | Pembinaan Kegiatan Lomba P2WKSS |

| | | | | |
|---|---|----|--|---|
| 2 | 3 | 14 | | Pembinaan Kegiatan Lomba GSI |
| 2 | 3 | 15 | | Pembinaan Kegiatan Lomba KB-KES (PKK/TNI/POLRI) |
| 2 | 3 | 16 | | Pembinaan Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat |
| | | | | Dst |
| | | | | |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | <i>Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Aparatur dan Lemabaga Kemasyarakatan Desa</i> |
| 2 | 4 | 1 | | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 2 | | Pelatihan BPD |
| 2 | 4 | 3 | | Pelatihan LPM Desa |
| 2 | 4 | 4 | | Pelatihan TPK Desa |
| 2 | 4 | 5 | | Pelatihan PKK Desa |
| 2 | 4 | 6 | | Pelatihan Kelembagaan Desa lainnya |
| | | | | |
| | | | | <i>Kegiatan Pelatihan Aparatur dan Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa</i> |
| 2 | 4 | 7 | | Pelatihan Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa |
| 2 | 4 | 8 | | Pengiriman Aparatur / Kader Sebagai Peserta Pelatihan |
| 2 | 4 | 9 | | Pelatihan Kerajinan Masyarakat |
| 2 | 4 | 10 | | Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif |
| 2 | 4 | 11 | | Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| 2 | 4 | 12 | | Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal |
| 2 | 4 | 13 | | Pelatihan Budi Daya Pertanian |
| 2 | 4 | 14 | | Dst..... |
| | | | | |
| 2 | 5 | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | Kejadian Luar Biasa/Wabah |
| 2 | 5 | 2 | | Keadaan Darurat |
| | | | | |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | | | |
| 3 | 2 | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| | | | | |

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu :
Pelaksanaan

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH (Rp) | | | | |

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR
 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

| No. | Tgl | Uraian | Penerimaan (Rp.) | | No Bukti | Pengeluaran(Rp.) | | Jumlah Pengembal ian ke Bendahara | Saldo Kas (Rp.) |
|-----|-----|---|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|--|--------------------|
| | | | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | | | |
| | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | | | |

Desa.....
,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. *Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.*
2. *Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.*
3. *Kolom 1 diisi dengan nomor urut.*
4. *Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*
5. *Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.*
6. *Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.*
7. *Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.*
8. *Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.*
9. *Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.*
10. *Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.*
11. *Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.*
12. *Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.*

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG
 UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.) | PERMINTAAN SEKARANG (Rp.) | JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.) | SISA DANA (Rp.) |
|-----|--------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
 Kepala Desa

Telah dibayar lunas
 Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|----------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal,
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20
 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

| No | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF | SALDO (Rp) |
|--------|------|---------------|--------|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | Rp. | Rp. | | | |

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....
Cara Pengisian :

.....

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20
 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

| NO. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

*Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20
 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | PEMASUKAN | | PENGELUARAN | | | SALDO |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| | | | | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | | | |

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

.....
Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

.....

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REK | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp.) | KET. |
|----------|---|---|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | |
| | | | | - Benda POS | | | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | | | |
| | | | | - Air, Listrik, dan Telepon | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Komputer | | | | |
| | | | | - Meja dan Kursi | | | | |
| | | | | - Mesin TIK | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggadaan | | | | |
| | | | | - Komsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Semen | | | | |
| | | | | - Material | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3 | 1 | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (SEMESTER AKHIR TAHUN)

LAPORAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REK | URAIAN | | | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/KURANG (Rp.) | KET |
|----------|--------|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-----|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA) | | | | |
| 1 | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 Bantuan Kabupaten | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 3 | | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | |
| | | | | - Benda POS | | | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | | | |
| | | | | - Air, Listrik,dan Telepon | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Komputer | | | | |
| | | | | - Meja dan Kursi | | | | |
| | | | | - Mesin TIK | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggadaan | | | | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | | | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Semen | | | | |
| | | | | - Material | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang & Jasa : | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | - dst..... | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | | |
| | | | | - Aspal | | | | | |
| | | | | - Pasir | | | | | |
| | | | | - dst | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | | | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | |
| | | | | - Honor Pelatih | | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | | |
| | | | | - Bahan Pelatihan | | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | |
| | | | | - Honor pelatih | | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | | |
| | | | | - Bahan pelatihan | | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | | |
| | | | | - Honor tim | | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | | |
| | | | | - Obat-obatan | | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan..... | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 3 | 1 | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA
KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 5. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| | ===== |

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp.
Rp.
Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
- 2. Lampiran II : Laporan (Aset) Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
- 3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Telah di Evaluasi Bupati/walikota
a.n. Camat
ttd
(.....)

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

(Nama tanpa pangkat dan gelar)

LEMBARAN DESA TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.....TAHUN
ANGGARAN.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REK | | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|----------|---|---|---|---|-------------------|--------------------|---------------------------|------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | <i>Pendapatan Lain lain</i> | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | | | | |
| | | | | - Benda POS | | | | |
| | | | | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | | | |
| | | | | - Perjalanan Dinas | | | | |
| | | | | - Pemeliharaan | | | | |
| | | | | - Air, Listrik, dan Telepon | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Komputer | | | | |
| | | | | - Meja dan Kursi | | | | |
| | | | | - Mesin TIK | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | Operasional BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggandaan | | | | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - ATK | | | | |
| | | | | - Penggadaan | | | | |
| | | | | - Komsumsi Rapat | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | | | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | Perbaikan Saluran Irigasi | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | | | | |
| | | | | - Semen | | | | |
| | | | | - Material | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 2 | 2 | 2 | | Pengaspalan jalan desa | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : | | | | |
| | | | | - Upah Kerja | | | | |
| | | | | - Honor | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: | | | | |
| | | | | - Aspal | | | | |
| | | | | - Pasir | | | | |
| | | | | - dst | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 3 | | | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor Pelatih | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Bahan Pelatihan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 4 | | | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor pelatih | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Bahan pelatihan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| 2 | 5 | | | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | | | | |
| | | | | - Honor tim | | | | |
| | | | | - Konsumsi | | | | |
| | | | | - Obat-obatan | | | | |
| | | | | - dst..... | | | | |
| 2 | 5 | 2 | | Kegiatan..... | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3 | 1 | | | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) | | | | |
| | | | | - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) | | | | |

KEPALA DESA

TTD

.....

LAMPIRAN II PERATURAN DESA

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA.....TAHUN ANGGARAN.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|--|---|------------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst..... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II) | | |
| | | |

KEPALA DESA.....

TTD

(.....)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LAMPIRAN III PERATURAN DESA

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA.....TAHUN
 ANGGARAN.....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

| No. | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (1) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (2) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total (4) | | | | | | | Rp. |
| Grand Total (1 s/d 4) | | | | | | | Rp. |

tanggal,

 Kepala Desa
 (.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

